

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI BERKALA
INSTANSI/SKPD: BADAN DIKLAT DIY**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Profil Badan Diklat DIY : a. Selayang Pandang Badan Diklat DIY b. Visi dan Misi Badan Diklat DIY c. Tugas Pokok dan Fungsi Badan Diklat DIY d. Struktur organisasi Badan Diklat DIY e. Sarana Prasarana Badan Diklat DIY f. Data Jumlah Pegawai Badan Diklat DIY g. Data Pejabat Struktural h. Data Widyaiswara Badan Diklat DIY i. Grand Design Badan Diklat DIY j. Alamat Badan Diklat DIY k. Alamat Email Badan Diklat DIY l. No Telp dan No. Fax m. Peta Lokasi Badan Diklat melalui <i>Google Map</i>	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2018	√		√	Selama belum ada perubahan
2.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) tahun 2017 : a. Program/kegiatan 2017 b. Target tahun 2017 c. Realisasi tahun 2017	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2018	√		√	1 Tahun
3.	Laporan keuangan APBD tahun 2017 a. Laporan Realisasi Anggaran b. Neraca	Subbagian Keuangan	Subbagian Keuangan	2018	√		√	1 Tahun

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
	c. Catatan Atas Laporan Keuangan							
4.	Review Rencana Strategis 2012-2017: a. Gambaran Pelayanan Badan Diklat DIY b. Isu-isu Strategis c. Rencana Program dan Kegiatan d. Indikator Kinerja	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2017	√		√	5 tahun
5.	Statistik alumni peserta diklat	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2018	√		√	1 tahun
6.	a. UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2014			√	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan
	b. PP Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pemberhentian PNS Yang Mencapai Batas Usia Pensiun Bagi Pejabat Fungsional			2014			√	
	c. PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil			2017			√	
	d. PP Nomor 101 Tahun 2000 tentang Diklat Jabatan Pegawai Negeri Sipil			2000			√	
	e. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			2010			√	
	f. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			2012			√	

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
	g. Permenpan RB Nomor 77 Tahun 2012 Tentang Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan Angka Kreditnya			2012			√	
	h. Perka LAN Nomor 17 tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka LAN Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2017			√	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan
	i. Perka LAN Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Perka LAN Nomor 22 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan I dan Golongan II			2017			√	
	j. Perka LAN Nomor : 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas PerKa LAN Nomor 10 tahun 2015 ttg Pedoman Penyelenggaraan Diklat Prajabatan CPNS Gol. II, dan/atau Gol. III yang Diangkat dari Tenaga Honorer Kat. 1 dan/atau Kategori 2			2017			√	
	k. Peraturan Kepala LAN Nomor 24 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara			2016			√	
	l. Perka LAN Nomor 20 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV			2015			√	

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
	m. Perka LAN Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III			2015			√	
	n. Perka LKPP No. 15 Tahun 2013 tentang Juknis Inpassing Jabatan Fungsional Pengelola PBJ	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2013			√	Selama belum ada perubahan peraturan/ keputusan/ kebijakan
	o. Peraturan Kepala BKN Nomor 8 Tahun 2013 Tentang Pedoman Perumusan Standar Kompetensi Teknis Pegawai Negeri Sipil			2013			√	
	p. Lampiran Perka LKPP Nomor 14 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012			2012			√	

Yogyakarta, 2 April 2018

Plt. Sekretaris

Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si
NIP. 19670502 199403 1 008

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI SERTA MERTA
INSTANSI/SKPD: BADAN DIKLAT DIY**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
	~ nihil ~							

Yogyakarta, 2 April 2018

Plt. Sekretaris

Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si
NIP. 19670502 199403 1 008

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
INFORMASI SETIAP SAAT
INSTANSI/SKPD: BADAN DIKLAT DY**

No.	Ringkasan Isi Informasi	Penanggung jawab Pembuatan / Penerbit Informasi	Unit Kerja yang Menguasai	Waktu Pembuatan Informasi	Format			Retensi Arsip
					Cetak	Rekam	Online	
1.	Prosedur Pendaftaran Peserta Diklat	Subbidang Kepesertaan	Subbidang Kepesertaan	2018			√	
2.	Jenis-jenis diklat yang dilaksanakan tahun 2018	Bidang Pengajaran	Bidang Pengajaran	2018	√		√	
3.	Jadwal pelaksanaan diklat tahun 2018	Bidang Pengajaran	Bidang Pengajaran	2018	√		√	
4.	Kalender Akademis 2018	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2018			√	
5.	Informasi interaktif / tanya jawab melalui website Badan Diklat DIY	Subbagian Program Data dan TI	Subbagian Program Data dan TI	2018			√	

Yogyakarta, 2 April 2018
Plt. Sekretaris

Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si
NIP. 19670502 199403 1 008

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK
DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
INSTANSI/SKPD: BADAN DIKLAT DIY**

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualikan	Konsekuensi	
				Akibat Bila Informasi Dibuka	Manfaat Bila Informasi Ditutup
1.	Data nilai individual peserta diklat	Pasal 17 huruf h angka 4 UU No 14 tahun 2008 tentang KIP	Selamanya, kecuali peserta diklat yang bersangkutan memperbolehkan	Mengungkap data pribadi kemampuan intelektual yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia
2.	Data pribadi pegawai	UU no 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian jo UU No 43 Tahun 1999	Selama yang bersangkutan menjadi PNS atau mendapat persetujuan yang bersangkutan	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Menjaga privasi , melindungi dari penyalahgunaan data/informasi yang bersangkutan
3.	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang dan jasa	Menimbulkan penilaian yang tidak objektif	Efisiensi anggaran karena diperoleh penawaran harga yang wajar
4.	Dokumen Penawaran kontrak Pengadaan Barang dan Jasa	Perpres No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang dan Jasa pasal 66 - Perpres No. 70 tahun 2012 tentang Pengadaan barang dan Jasa	Selama proses pengadaan barang/jasa	Muncul persaingan usaha tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas Penilaian
5.	Laporan Keuangan yang belum diaudit	Kepmendagri tentang transparansi pengelolaan keuangan daerah	Sampai audit selesai	Belum terjaminnya kebenaran informasi	Laporan keuangan yang belum diaudit tidak ter-ekspose

6.	Daftar nilai DP3/ SKP PNS	UU no 14 Tahun 2008 tentang KIP pasal 17 huruf i PP no.10 tahun 1979 tentang penilaian pelaksanaan pekerjaan PNS pasal 6	Tidak Terbatas	Mengungkap data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia
7.	Data usulan pemindahan, pengangkatan dan pemberhentian PNS dari jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	PP Nomor 9 tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS	Sampai diterbitkannya SK	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan fungsional tertentu dan fungsional umum	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
8.	Data usulan Pemindahan dan Pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	PP Nomor 13 Tahun 2002 tentang Pengangkatan PNS dalam Jabatan Struktural	Sampai terlaksananya pelantikan dan pengambilan sumpah	Akan menghambat proses pemindahan dan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja
9.	Surat-surat yang bersifat rahasia dengan kode X Sangat Rahasia (SR) dan Rahasia (R).	Peraturan Gubernur DIY Nomor 30 Tahun 2011 tentang Tatanaskah Dinas di Prov. DIY	Hingga proses surat tersebut selesai	Menghambat Kebijakan Pimpinan	Menjaga suasana kondusif di lingkungan kerja

Yogyakarta, 2 April 2018

Plt. Sekretaris

Drs. WIRYAWAN SUDIANTO, M.Si
NIP. 19670502 199403 1 008